

Artikel Konseptual

MELIHAT MOTIF PENDIDIKAN DI NUSANTARA DARI PERSPEKTIF HISTORIS

Ronal Ridho'i

ronal.ridhoi.fis@um.ac.id

Prodi Sejarah, Universitas Negeri Malang

Abstract. *this paper aims to explain the motives of education in Archipelago (Indonesia) since pre-history until the contemporary period. Whether the motives of education in the archipelago have changed every period? Or it just shows the continuity? The author attempt to look this phenomenon on historical perspective with peruses some literature such as books, articles, archives and online magazine. This paper finds out that the motive of education in Archipelago has been changed from the prehistory period until the colonial period (from practice to economic motive). Since colonial to a contemporary period we can find the continuity about the motive, that is the economic motives to produce a worker. That phenomenon still continues until today.*

Key words: *motive of education, archipelago, historical perspective.*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan manusia untuk kehidupan yang lebih baik. Melalui pendidikan manusia menjadi sosok yang mempunyai intelektualitas dan keterampilan tertentu, karena pada dasarnya pendidikan mengajarkan cara berpikir dan juga praktik. Tulisan ini membahas sejarah sekaligus motif pendidikan di Nusantara¹ dari periode sebelum dikenalnya tulisan (prasejarah) hingga periode kontemporer. Istilah Nusantara digunakan dalam tulisan ini untuk menjelaskan sejarah jangka panjang karena sebelum kedatangan bangsa Barat Indonesia masih disebut dengan Nusantara. Penulis menggunakan pendekatan historis agar dapat memaparkan sistem pendidikan dan motif pendidikan dari waktu ke waktu.

¹ Istilah 'Nusantara' (selanjutnya bisa disebut Indonesia) digunakan dalam tulisan ini karena merujuk pada pengalaman masa lalu wilayah-wilayah yang ada di negeri ini, yaitu ketika kesatuan wilayah Indonesia dikuasai oleh Majapahit, khususnya ketika kerajaan besar ini dibawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dengan Maha Patihnya yang bernama Gadjah Mada (1293-1389). 'Nusantara' merujuk pada kesatuan pulau-pulau yang ada di daratan Indonesia saat ini. Vlekke menggunakan istilah 'Nusantara' dalam bukunya *Nusantara: A History of Indonesia*. Istilah ini sebenarnya cukup revolusioner, di mana pihak Belanda menganggap bahwa di Indonesia pada masa lalu belum pernah ada negara kesatuan sebelum mereka (Belanda) datang ke Indonesia. Vlekke sepertinya ingin melihat sejarah Indonesia ini secara komprehensif dengan perspektif Indonesiasentris, tapi hal ini bukan berarti dia mendiskreditkan historiografi yang cenderung Neerlandosentris. Lihat Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara: Sejarah Indonesia*, (Jakarta: KPG, 2008).

Dalam sejarah pendidikan di Nusantara, Kroef (1957: 147-151) membaginya menjadi 3 periode, yaitu pendidikan pribumi (*native/autochthonous*), pendidikan pada masa kolonial dan pendidikan pada masa nasionalisasi. Pembabakan dalam tulisan ini tidak disesuaikan dengan 3 kategorisasi tersebut, karena menurut pendapat penulis dalam periode pendidikan pribumi masih terdapat pengaruh-pengaruh dari kebudayaan lain, seperti Hindhu-Buddha dan Islam. Jadi pada dasarnya pembabakan tersebut belum dapat digabungkan. Penulis membagi sejarah pendidikan di Indonesia menjadi 4 tahap, yakni pendidikan prasejarah, pendidikan klasik, pendidikan kolonial dan pendidikan nasional.

Cakupan waktu yang cukup panjang dalam tulisan ini ditujukan untuk mengetahui perbedaan dan perubahan motif pendidikan. Tulisan ini bertujuan untuk melihat dinamika pendidikan secara umum di Nusantara dengan disertai contoh-contoh kasus di beberapa wilayah, seperti Sumatra, Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Nusa Tenggara. Oleh sebab itu, yang disajikan hanya pemaparan singkat saja untuk menarik perhatian para peneliti lainnya agar bisa melakukan penelitian dan penulisan yang lebih mendalam tentang sejarah pendidikan di berbagai wilayah di Nusantara.

BERTAHAN DI TENGAH KERASNYA ALAM; BELAJAR UNTUK TETAP HIDUP DI MASA PRASEJARAH

Pada masa prasejarah pendidikan lebih bersifat praktis. Keterbatasan manusia purba dalam tradisi literasi menyebabkan hubungan antara orang tua (guru) dan anak (murid) berlangsung secara alamiah. Orang tua mengajarkan anak-anak mereka untuk bisa hidup di hutan belantara, mencari makan dari binatang buruan dan tumbuhan-tumbuhan yang tidak berbahaya. Pendidikan lebih berupa pengajaran dengan metode lisan dan pemberian contoh-contoh tertentu. Dalam hal ini bahasa ibu sangat berpengaruh bagi kemampuan anak untuk memperoleh dan menyerap setiap pelajaran yang diberikan. Pada periode ini belum dikenal institusi khusus (seperti sekolah) yang bergerak dalam bidang pendidikan.

Tujuan pendidikan lebih difokuskan pada pelajaran untuk bertahan hidup dan ritual-ritual kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Dalam pelajaran untuk bertahan hidup, setiap laki-laki diajarkan untuk berburu, sedangkan perempuan lebih diajarkan untuk meramu (memasak hasil buruan dan membuat makanan). Pembagian kerja pada saat itu sudah dilakukan, di mana laki-laki dan perempuan sudah mendapatkan bagian dan tugasnya masing-masing. Selanjutnya, setiap orang diajarkan untuk melestarikan kepercayaan mereka. Ini dilakukan dengan pengajaran ritual-ritual kepercayaan yang harus dilakukan pada roh nenek moyang mereka (Soejono, 1977: 189).

Pada masa berburu dan meramu manusia purba sangat tergantung dengan faktor alam, seperti iklim, kesuburan tanah dan keadaan binatang yang bisa diburu. Setiap orang mendapatkan pengajaran tentang tata cara berburu, baik di daratan maupun di perairan (Soejono, 1977: 147). Para laki-laki diajarkan membuat anak panah, tombak, mata pisau, alat penetak dan sebagainya. Mereka juga diajarkan cara menguliti, memotong dan membagi hasil buruan. Sedangkan perempuan lebih diajarkan untuk meramu dan mengumpulkan makanan dari tumbuhan, seperti buah-buahan, ubi-ubian, biji-bijian, dedaunan dan sebagainya. Tujuan utama mereka adalah agar bisa bertahan hidup dan tidak kekurangan makanan.

Pada periode selanjutnya dikenal masa bercocok tanam. Manusia purba sudah mengembangkan pertanian dan peternakan. Anak-anak usia produktif diajarkan untuk bercocok tanam dengan menggunakan peralatan-peralatan yang masih sederhana, seperti beliung persegi, kapak lonjong dan gerabah untuk menyimpan hasil pertanian. Pendidikan masih diajarkan dalam bentuk praktik dan belum mengenal kegiatan institusional walaupun kehidupan mereka sudah menetap di dekat lokasi-lokasi pertanian dan peternakan (Soejono, 1977: 156-157). Kehidupan manusia masa ini tidak seperti sebelumnya yang menetap di gua-gua, tetapi mereka sudah menetap di satu rumah tertentu di sebuah daerah yang terdiri dari beberapa rumah tangga. Walaupun demikian, belum ditemukan bukti-bukti tentang adanya institusi pendidikan di daerah tersebut.

Selain berburu, meramu, bertani dan berternak, pelajaran lainnya yang dapat dilihat dari manusia purba adalah tentang kepercayaan. Penghormatan mereka terhadap kepala suku (ketua kumpulan) dan juga proses penguburan jenazah tidak dapat dilepaskan dari sistem kepercayaan dan pendidikan. Setiap orang diajarkan bahwa seorang kepala suku harus dihormati karena dia adalah orang yang notabene lebih kuat dan mempunyai kekuatan magis daripada yang lainnya. Selain itu, kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan kehidupan abadi setelah mati menimbulkan nilai-nilai baru dalam masyarakat. Setiap orang diberikan pengetahuan bahwa lukisan-lukisan di dinding gua yang berupa kapal dan binatang bersayap merupakan upaya untuk menghormati roh nenek moyang, dengan anggapan bahwa simbol-simbol tersebut dapat digunakan sebagai kendaraan menuju alam yang lain. Pelajaran yang lainnya yaitu menguburkan jenazah seseorang dengan bermacam-macam barang sehari-hari mereka, seperti perhiasan, periuk dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar perjalanan orang yang mati tersebut ke alam lain dapat terjamin dengan sebaik-baiknya dan agar dapat menuju ke tempat arwah nenek moyang mereka atau asal-usul mereka (Soejono, 1977: 189-190).

Dari beberapa motif pelajaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada masa prasejarah masih terkesan sederhana. Tujuan pendidikan hanya untuk bertahan hidup dengan memanfaatkan apa yang bisa diambil dari lingkungannya. Pada

perkembangannya masyarakat sudah mulai mengenal sistem kepercayaan yang membuat mereka lebih menghormati dan melestarikan alam. Walaupun manusia purba sudah hidup menetap dan mempunyai bahasa tertentu, mereka belum mendirikan lembaga-lembaga institusional, seperti sekolah atau rumah belajar. Hal ini disebabkan karena kebutuhan mereka pada saat itu masih sederhana dan didominasi oleh pemikiran-pemikiran subsisten.² Apa yang dibutuhkan pada saat itu merupakan prioritas yang mereka cari dan begitu seterusnya, karena mereka beranggapan bahwa alam menyediakan apa yang mereka butuhkan. Berdasarkan hal tersebut, maka pendidikan dan pengajaran pada masa prasejarah memang didasarkan pada kebutuhan, khususnya untuk hidup.

PENDIDIKAN UNTUK MISI KEAGAMAAN

Subbab ini membahas pendidikan ketika pengaruh Hindu-Buddha dan Islam masuk Nusantara. Pendidikan yang diajarkan bukan pengetahuan umum seperti yang dikenal saat ini, tapi lebih berupa pelajaran-pelajaran religius. Pada dasarnya sistem pengajaran yang dilakukan pada masa ini memiliki kesamaan, yaitu dengan metode dakwah (misionari/penyebaran agama). Metode pengajaran juga masih sederhana dan belum mengenal institusi-institusi khusus (sekolah), tetapi masih berbentuk *mandala*³ dan pesantren⁴ untuk tempat pendidikan Hindu-Buddha dan Islam. Tempat-tempat tersebut merupakan tempat pendidikan sekaligus asrama untuk tempat tinggal para murid.

² Subsisten yaitu pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya berdasarkan apa yang dibutuhkan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang hidup subsisten biasanya memproduksi sesuatu untuk dikonsumsi sendiri (lingkup keluarga kecil) dan tidak untuk dijual.

³ *Mandala* atau bisa juga disebut *wanasrama-kadewaguruan* merupakan pusat pengajaran agama yang dahulu berada di pedukuhan yang terletak di lereng-lereng gunung. Di dalamnya terdapat guru/*mahapanditha*/*siddhaguru* yang sangat tinggi ilmunya. Mereka mempunyai murid-murid yang tinggal dalam satu area pedukuhan *mandala* tersebut. Lihat Hariani Santiko, "Kehidupan Beragama Golongan Rsi di Jawa", dalam Edi Sedyawati (eds.), *Monumen: Karya Persembahan Untuk Prof.Dr.R.Soekmono* (Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1990), Lembaran Sastra Seri Penerbitan Ilmiah No.11 Edisi Khusus hlm. 156-171.

⁴ Pesantren adalah adalah tempat para santri (murid) yang belajar ilmu agama Islam. Pesantren ini terdiri dari sekumpulan pondok yang berada di sekitar Masjid. Konsep ini hampir sama dengan asrama jika dilihat pada periode sekarang ini. Lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1985), hlm. 231.

Pada periode ini pendidikan masih bersifat klasik, seperti pendapat Kroef (1957: 147), organisasinya masih bersifat lokal (*autochtonous*) yang merupakan era di mana pengaruh pendidikan ala Barat belum diperkenalkan di Nusantara. Tipe dari pendidikan lokal ini dianggap masih belum formal secara institusi dan masih fokus pada penggunaan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan nilai adat setempat. Dalam hal ini adalah penggunaan kaidah adat dalam masyarakat desa, pengajaran norma dan tingkah laku kepada anak. Diharapkan tipe pengajaran yang seperti ini dapat membawa pengaruh positif terhadap hubungan anak dengan orang tua, penduduk sekitar dan kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan sosial-ekonomi. Tidak hanya itu, pengajaran terhadap kewajiban-kewajiban religius juga ditekankan. Penanaman nilai-nilai Hindu-Buddha dan Islam selalu diutamakan karena kedua agama tersebut pada dasarnya bertujuan mendidik sambil mencari pangikut sebanyak-banyaknya.

Pendidikan masa Hindu-Buddha dimulai sejak awal masehi. Beberapa kerajaan tertua di Nusantara, seperti Kutai (abad ke-5) dan Sriwijaya (abad ke-7) menandai pendidikan yang bernuansa Hindu dan Buddha. Proses belajar mengajar diselenggarakan di sebuah *mandala*. Para murid diberikan pengajaran bahasa Sanskreta dari India, mengingat pengaruh Hindu-Buddha tersebut berasal dari India. Dengan metode yang masih sederhana para murid diajarkan membaca dan menulis. Mereka tinggal di asrama yang berada satu kompleks dengan tempat mereka belajar. Hal ini dimaksudkan agar guru bisa memantau perkembangan para murid dan agar tercipta hubungan dekat antar mereka. Hal ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan intensif.

Sriwijaya, yang terkenal dengan pelabuhan dan kota dagang terbesar di Nusantara sejak abad ke-7 telah menjadi tempat belajar bahasa Sanskreta dan filsafat-filsafat Buddha. Dalam catatan perjalanan I-Tsing, dilaporkan bahwa para sarjana dari China yang ingin memperdalam ajaran Buddha di India banyak yang singgah di Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskreta. Di Sriwijaya mereka diajarkan bahasa, membaca, menulis dan dasar-dasar filsafat Buddha. Sejak abad ke-7 kerajaan ini sudah terkenal sebagai pusat pembelajaran Buddha di Nusantara. Pada saat itu pengajaran juga dilakukan di *mandala-mandala* yang ada di Sriwijaya. Para sarjana dari China tersebut menetap beberapa tahun untuk belajar. Setelah mahir berbahasa Sanskreta, mereka selanjutnya berangkat ke India melalui Selat Malaka (Muljana, 2006: 145). Penelitian Coedes terhadap Prasasti Talang Tuo di Palembang (abad ke-7) serta dari sumber-sumber China menyatakan bahwa Sriwijaya pada saat itu merupakan pusat pembelajaran, di mana para penyebar agama Buddha menghabiskan beberapa tahun untuk memperdalam pengetahuannya (Manguin, 1993: 31).

Motif dari pendidikan di masa Hindu-Buddha ini adalah mencetak para guru (*mahapanditha*) agar mereka bisa menyebarkan pengaruh agama tersebut di pelosok

Nusantara. Selain itu, mereka nantinya akan mengabdikan kepada raja dan menjadi juru tulis kerajaan, arsitek dan jasa pertukangan. Seperti di Kerajaan Mataram Kuno hingga Kediri dan Majapahit, pada abad ke-10 hingga abad ke-15 terdapat beberapa orang yang menjadi sastrawan atau pujangga yang menghasilkan kitab-kitab besar, seperti Kitab Arjuna Wiwaha oleh Mpu Kanwa (1030), Kitab Bharatayuda oleh Mpu Sedah dan Mpu Panuluh, Kitab Negarakretagama oleh Mpu Prapanca (1365), Kitab Sutasoma oleh Mpu Tantular, Kitab Pararaton dan sebagainya (Santiko, 1990: 159-168).

Bagi guru yang berada di lingkungan istana, maka pendidikan terhadap anak-anak raja merupakan tanggung jawab mereka. Anak-anak raja diberi pengajaran tentang agama, ritual-ritual (upacara), membaca dan menulis. Pendidikan lebih bersifat eksklusif, di mana hanya anak-anak dari kalangan istana saja yang bisa mendapat pendidikan. Di dalam istana tersebut terdapat padepokan-padepokan yang hampir mirip dengan *mandala*. Selain di istana, *mandala* juga berada di pedukuhan-pedukuhan yang terletak di lereng gunung. Pengajaran tentang ilmu-ilmu filsafat agama mulai diberikan agar setiap anak-anak raja atau keluarga raja bisa meneruskan kepercayaan para pendahulu mereka. Jadi jelas, pendidikan pada masa Hindu-Buddha ini adalah jelas berorientasi pada agama (Santiko, 1990: 163).

Pendidikan masa Islam di Nusantara dimulai sejak abad ke-11 bersamaan dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Pendidikan Islam merupakan sistem pengajaran Kitab Suci Al-Qur'an, kitab-kitab fikih, dan ketauhidan dalam agama Islam yang pada saat itu dilaksanakan di dalam pesantren-pesantren (Yunus, 1985: 10). Pendidikan di *pesantren* merupakan salah satu lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia. Pendidikan tersebut bercorak kebudayaan Indonesia asli dengan pola Kiai, santri, dan asrama serta Masjid (Moehadi, 1997:20). Pendidikan di pesantren merupakan hasil adaptasi dari pendidikan model Hindu-Buddha yang dulu disebut dengan *mandala*. Model tersebut terdiri dari guru dan murid yang secara bersama-sama tinggal dalam satu asrama.

Pesantren berasal dari kata *santri* yang berarti murid atau mungkin berasal dari kata *shastri* yang berarti huruf, sebab di dalam pesantren inilah mula-mula para santri belajar mengenal dan membaca huruf (*Arab/hija'iyah*). Guru dan terutama pimpinan pesantren mendapat sebutan Kiai, suatu predikat kehormatan terhadap tokoh yang dipandang mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu agama, kepemimpinan dan sifat salehnya. Dahulu tidak jarang tokoh kiai menjadi perintis cikal-bakal berdirinya suatu desa, sehingga mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat lingkungannya (Moehadi, 1997: 20).

Di beberapa daerah di Indonesia pada abad ke-11 hingga abad ke-18 sudah terdapat pesantren-pesantren dengan sistem pengajaran tradisionalnya. Hanya saja penyebutan istilah *pesantren* berbeda di setiap tempat. Di Jawa dari awal penyebaran

Islam sudah dikenal dengan sebutan pesantren. Sementara di Sumatra (Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara) masyarakat menyebutnya *langgar*, *pondok* atau *surau*. Walaupun demikian, maknanya masih tetap sama yaitu tempat yang digunakan untuk belajar nilai-nilai agama Islam. Begitu juga dengan beberapa tempat lain di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku. Sistem pengajaran model pesantren sudah mereka kenal sejak tahun 1500-an (Yunus, 1985: 322).

Sejak awal orientasi pendidikan pada periode ini memang difokuskan pada agama Islam. Di Jawa, pengajaran yang diberikan pada para santri yaitu baca-tulis Al-Qur'an, kitab-kitab *fiqh*, tafsir, hadits, dan ilmu tasawuf (ketauhidan). Selain itu, para santri juga diajarkan ilmu *nahwu*, *shorof*, dan ilmu *Falaq*. Para kiai beranggapan bahwa ketika seseorang sudah menguasai beberapa ilmu di atas maka ia sudah bisa terjun untuk menyebarkan Islam di masyarakat (Yunus, 1985: 224-225). Seiring perkembangan jaman, sistem *pesantren* ini kemudian berkembang dan melahirkan sistem pendidikan yang mengolaborasikan antara Islam dan ilmu umum. Hal ini dapat dilihat dari munculnya madrasah-madrasah, sekolah tinggi hingga Universitas Islam Negeri (UIN) seperti yang dikenal saat ini.

MENDIDIK UNTUK MENYEJAHTERAKAN PENJAJAH

Sebelum Belanda masuk ke Nusantara, pendidikan yang ada di daerah-daerah masih terkesan tradisional dan cenderung berorientasi pada agama. Sejak abad ke-19 upaya-upaya pendidikan ilmu umum bagi rakyat Indonesia mulai dilakukan oleh pihak Belanda. Pada dasarnya bentuk baru dalam lapangan pengajaran terjadi pada pemerintahan Daendels (1908-1911). Ia menaruh perhatian pada pengajaran bagi rakyat. Setelah itu pemerintahan Raffles (1811-1815) yang lebih memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan. Kecintaan Raffles terhadap ilmu pengetahuan ini ditunjukkan dengan penulisan karya monumentalnya, yaitu *The History of Java*. Pada periode selanjutnya, dengan diangkatnya Van den Bosch (1830) sebagai Gubernur Jenderal maka pendidikan di Nusantara memasuki lapangan baru. Pendidikan pada masa *cultuurstelsel* bisa dikatakan lebih baik dibandingkan jaman-jaman sebelumnya, karena sudah dapat berkembang dengan tujuan yang dilaksanakan (Djumhur & Danusuparta, 1959: 120). Walaupun tujuan pendidikan pada masa tanam paksa ini merupakan eksploitasi penduduk bumiputera.

Jika dilihat dari Undang-Undang Pokok Pendidikan di Indonesia maka tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah

air.⁵ Pernyataan tersebut belum ada ketika masa *cultuurstelsel*, karena memang pada saat itu Indonesia masih di bawah kekuasaan pemerintah Kolonial. Keterbelakangan rakyat Indonesia jelas terlihat pada abad ke-19. Pada saat itu telah ada pendidikan, tapi lebih diutamakan untuk golongan Bumiputera dan orang-orang Belanda sendiri. Pendidikan pada jaman itu adalah untuk golongan tertentu saja. Pemerintah kolonial Belanda belum memperhatikan hak-hak para pribumi rendahan. Padahal golongan-golongan pribumi merupakan penghuni dari sebagian besar wilayah di nusantara.

Cultuurstelsel yang diberlakukan dari 1830 hingga 1870 menandai babak baru modernisasi pendidikan di Nusantara. Pada masa ini Van den Bosch memberi kesempatan sedikit untuk anak-anak Jawa (khususnya golongan bumiputera atau anak priyayi) menikmati pendidikan di sekolah, karena Tanam Paksa yang baru dijalankan membutuhkan pegawai yang terdidik. Tetapi rencana untuk membuka sekolah yang lebih banyak mengalami kegagalan karena kekurangan dana akibat kekacauan di Eropa dan Perang Diponegoro di Jawa. Akhirnya ditempuh sistem magang⁶ walaupun yang diterima hanya anak-anak bangsawan. Ditentukan anak bangsawan karena dalam sistem pemerintahan tidak langsung, bangsawan merupakan partner Belanda untuk mengurus kekayaan di tanah air (Moehadi, 1997: 29).

Van den Bosch mengerti, bahwa untuk memperbaiki sistem pembangunan ekonomi bagi Belanda dibutuhkan banyak tenaga ahli. Maka mulai terasa kebutuhan akan sekolah-sekolah yang harus menghasilkan buruh pegawai. Tetapi karena adanya kesulitan keuangan untuk Hindia-Belanda sendiri, pendirian sekolah-sekolah itu terbatas sekali, meskipun hasil *cultuurstelsel* terus mengalir ke negeri Belanda dengan derasnya (Djumhur & Danusuparta, 1959: 122). Keterbatasan sekolah-sekolah untuk rakyat Indonesia tersebut seolah tidak diperhatikan, karena yang diutamakan adalah pendidikan anak-anak Belanda dan setelah itu baru anak-anak bumiputera. Anak-anak bumiputera yang bersekolah di sekolah Belanda nantinya akan dijadikan pegawai di perusahaan Belanda.

Begitulah cara Pemerintah Belanda memanfaatkan anak-anak para bangsawan untuk membantunya. Tanpa disadari mereka dijadikan pesuruh oleh Belanda. Menurut Moehadi para magang (anak-anak bangsawan) itu bertempat tinggal di rumah orang Belanda, sambil menjadi pesuruh Belanda, mereka belajar bahasa Belanda, menulis, membaca, berhitung, sesudah itu mereka dipekerjakan di bagian administrasi. Van den Bosch

⁵ Lihat UUPP 1950, Bab II, pasal 3.

⁶ Sistem magang merupakan pendidikan praktik yang dilakukan oleh para mandor kepada anak-anak bumiputera agar setelah anak-anak tersebut mengetahui sistemnya mereka bisa menjadi penerus mandor menggantikan seniornya.

terpaksa menempuh cara demikian karena ia menyadari bahwa untuk memperbaiki sistem pembangunan ekonomi (bagi Belanda) dibutuhkan tenaga ahli yang banyak (Moehadi, 1997: 29).

Antara tahun 1849-1852 didirikanlah 20 buah sekolah untuk anak-anak Indonesia di tiap-tiap ibukota karesidenan. Ketika itu sudah ada 30 sekolah untuk anak-anak Belanda. Perlu juga dikemukakan di sini, bahwa yang memasuki sekolah-sekolah itu masih terbatas pada anak-anak bangsawan saja. Anak-anak rakyat jelata tidak diperkenalkannya (Djumhur & Danusuparta, 1959: 122). Kesemua sekolah untuk anak pribumi tersebut didirikan di tempat kediaman residen. Sekolah yang mula-mula didirikan hanya di Pulau Jawa, karena Tanam Paksa berkembang di daerah ini. Pelajaran diberikan dalam bahasa daerah. Perlu juga dikemukakan di sini bahwa yang memasuki sekolah itu masih tetap terbatas pada anak bangsawan saja. Bagi anak petani atau rakyat jelata, belum diberi kesempatan menikmati belajar di sekolah (Moehadi, 1997: 30).

Semua itu dilakukan oleh Pemerintah Kolonial demi menyelamatkan negaranya dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Selain itu pemilihan murid-murid yang hanya dikhususkan terhadap kaum bumiputera memang dilakukan untuk mengisi kekosongan pegawai rendahan. Pada saat itu hubungan pemerintah kolonial dengan kaum bumiputera lebih dekat dibandingkan dengan kaum pribumi. Prioritas pendidikan pun dikhususkan untuk kepentingan anak-anak Belanda dan kaum bumiputera. Pemerintah kolonial Belanda juga takut terjadi resistensi dari penduduk setempat jika tidak ada pengendalian murid-murid pribumi. Mereka takut jika orang-orang pribumi yang sudah sekolah dan mengenal pendidikan nantinya akan menunjukkan resistensi terhadap Belanda.

Sistem pendidikan masa kolonial dibagi berdasarkan institusi sekolah. Institusi tersebut dibedakan antara sekolah untuk anak-anak Belanda dengan golongan pribumi. Sekolah yang didirikan untuk golongan anak-anak Belanda yaitu ELS (*Europe Lagere School*) yang didirikan tahun 1818. Sekolah ini pertama kali di Batavia (Jakarta) karena pada saat itu penduduk Eropa banyak yang tinggal di Batavia dan kegiatan ekonomi bisnis lebih difokuskan di sana. Di Bukittinggi dan beberapa tempat di Jawa dibangun Sekolah Guru (*Kweekschool*).⁷ Sekolah tersebut dibangun untuk menghasilkan guru-guru yang bisa mengajar di sekolah-sekolah yang akan didirikan berikutnya oleh pemerintah kolonial. Di Bukittinggi, Sumatra Barat sekolah ini didirikan tahun 1856 untuk mengantisipasi kekurangan guru, baik secara kualitas maupun kuantitas (Zulqayyim, 2005: 179).

⁷ *Kweekschool* di Hindia-Belanda pertama kali didirikan di Surakarta (1851), Bandung (1866), Tondang (1873), Ambon (1870), Probolinggo (1875), Banjarmasin (1875), Makassar (1876), Padangsidempuan (1879). Lihat Rusli Amran, *Sumatra Barat Plakat Panjang*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985).

Selain itu beberapa sekolah lainnya juga didirikan, seperti Sekolah Raja (*Hoofden School*)⁸, sekolah kelas satu (*Scholen der Eerste Klasse*) yang dikhususkan untuk anak-anak pembesar Bumiputra, Tionghoa dan keluarga kaya lainnya. Kemudian yang kedua adalah Sekolah Kelas Dua (*Scholen der Tweede Klasse*) yang diperuntukkan bagi anak-anak pribumi biasa. Keputusan Raja Belanda tersebut kemudian menjadi dasar Undang-undang Pokok 1893 yang mana antara lain sekolah kelas satu harus berada di ibukota kabupaten, kabupaten, kawedanan, kecamatan, pusat-pusat perdagangan dan industri. Sedang untuk sekolah kelas dua berada di wilayah industri yang berlangsung dua tahun dengan tiga materi yaitu membaca, menulis, dan berhitung (Nursalim, 2006: 32).

Pada tahun 1901 pemerintah kolonial melalui Gubernur Jenderal Van Deventer mengeluarkan kebijakan Politik Etis. Kebijakan tersebut dikenal dengan Triloginya, yakni edukasi, emigrasi dan irigasi. Dalam bidang pendidikan (edukasi), Politik Etis berdampak positif bagi pendirian pribumi biasa. Pada periode ini mulai dibuka Sekolah Desa (*Volkschool*) pada tahun 1907, Sekolah Lanjutan (*Vervolgschool*) pada tahun 1914, Sekolah Peralihan (*Schakelschool*) pada 1921, Sekolah Menengah Umum (*Algemeene Middelbareschool*), sekolah tinggi seperti STOVIA (1902) dan *Technisch Hogere School* (1920) serta beberapa sekolah lainnya (Leirissa, 1985: 176-177).

Dari beberapa uraian di atas dapat dijelaskan mengenai gambaran pendidikan pada waktu itu. Pada dasarnya penyebaran pengajaran bagi rakyat jelata selalu ditunda-tunda. Usaha perluasan sekolah bagi anak bumiputera selalu mendapat tantangan. Pemerintah Kolonial Belanda khawatir kalau perluasan sekolah yang terlalu cepat bagi rakyat bumiputera merupakan bahaya besar bagi kedudukan kaum penjajah. Selain itu, tujuan pendirian sekolah bukan untuk mendidik rakyat, bukan untuk mempertinggi derajat hidup rakyat, tapi untuk memenuhi kepentingan kaum pihak *colonizer* untuk mengisi kekurangan pegawai yang murah. Pada periode ini juga terdapat dualisme pendidikan, yaitu pendidikan khusus untuk warga Eropa dan bumiputera (priyayi). Bahkan pendidikan untuk pribumi menengah ke bawah baru diusahakan di awal abad ke-20.

Pada masa Pendudukan Jepang (1942-1945) pendidikan di sekolah-sekolah kurang diperhatikan. Pada saat itu yang masih difungsikan adalah sekolah umum dan sekolah kejuruan. Kegiatan belajar mengajar pun juga dimasuki pendidikan militer, agar sewaktu-

⁸ *Hoofden School* didirikan di beberapa daerah seperti Tondano (1865), Bukittinggi (1873), Bandung (1878). Sekolah ini merupakan sekolah yang mendidik para pangreh praja (pegawai negeri). Sekolah ini juga diselenggarakan dengan sistem pengasramaan agar gurunya bisa memantau perkembangan murid-murid mereka secara langsung. Dalam perkembangannya sekolah ini kemudian tahun 1900 berubah menjadi OSVIA (*Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren*) hingga menjadi IPDN (Institut Pendidikan Dalam Negeri) saat ini. lihat Zulqayyim, *op.cit.*, hlm. 179.

waktu ketika terjadi perang dengan Sekutu para murid-murid bisa ikut bertempur bersama tentara Jepang. Hal ini dilakukan karena Jepang ingin mengajak bangsa Indonesia mencapai kemakmuran Asia Timur Raya di bawah hegemoni Jepang. Dualisme pendidikan mulai dihapuskan dan terdapat penyeragaman untuk pendidikan dasar selama 6 tahun, pendidikan menengah dan umum masing-masing selama 3 tahun (Sjamsuddin, 1993: 5-6). Kebijakan ini kemudian masih tetap dilanjutkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Sekolah Dasar yang diberlakukan selama 6 tahun juga.

ANTARA IDEOLOGI DAN EKONOMI; MOTIF PENDIDIKAN PASCAKEMERDEKAAN INDONESIA

Setelah mengalami proses kolonisasi yang cukup lama oleh pemerintah kolonial Belanda, barulah negeri ini bisa memproklamkan kemerdekaannya tahun 1945. Sejarah pendidikan pada periode 1945-1949 memang cukup memprihatinkan akibat Perang Revolusi. Banyak gedung-gedung sekolah yang dimusnahkan dan dijadikan kantor-kantor basis perjuangan. Alat-alat pengajaran pun banyak yang rusak dan hilang, sedangkan guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah rakyat banyak yang meninggalkan profesinya dan bergabung dengan kemiliteran. Pada tahun 1945-1950 sistem pendidikan yang diberlakukan di Indonesia adalah pendidikan rendah (Sekolah Rakyat), pendidikan guru, pendidikan umum (SMP dan SMT), pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi, seperti UGM Yogyakarta (Sjamsuddin, 1993: 18-22).

Pada masa Orde Soekarno hingga Orde Soeharto sistem pendidikan masih melanjutkan sistem yang sebelumnya. Hanya saja terdapat peralihan institusi, seperti Sekolah Rakyat menjadi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tinggi menjadi Sekolah Menengah Atas, dan sebagainya. Tujuan pendidikan pun dipengaruhi oleh sifat-sifat nasionalisme dan sosialisme para pemangku kebijakan. Pada masa Orde Soekarno, buku-buku pelajaran (khususnya sejarah) dimasuki kepentingan-kepentingan nasionalis untuk menunjukkan rasa cinta tanah air Indonesia. Tujuan pendidikan harus sesuai dengan konsep politik Soekarno, yaitu Manipol-Usdek.⁹ Jadi pendidikan ditujukan untuk menanamkan jiwa yang memiliki kepeloporan dalam membela dan mengembangkan Manipol-Usdek tersebut. Setiap sekolah harus menyertakan mata pelajaran *civics* (kewar-

⁹ Manipol-Usdek adalah singkatan dari Manifesto politik Republik Indonesia – Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Lihat Herbert Feith, *Soekarno-Militer dal Demokrasi Terpimpin*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 79.

ganegaraan) agar dapat memperkuat ideologi bangsa, yakni Pancasila. dalam mata pelajaran tersebut terdapat 3 rumpun ilmu yang diajarkan, yakni Sejarah, Geografi dan pengetahuan kewarganegaraan (Sjamsuddin, 1993: 78-79). Pada dasarnya memang ketiga ilmu ini penting untuk menanamkan ideologi Pancasila dan semangat nasionalisme bangsa Indonesia.

Pada masa Orde Soeharto pendidikan lebih diarahkan untuk membentuk manusia yang mempunyai sifat pancasilais. Setiap mata pelajaran di sekolah dasar, menengah hingga umum harus menyertakan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Setiap murid diharapkan bisa memahami pelajaran tersebut. Maka tidak heran ketika itu setiap murid diwajibkan untuk menghafalkan Pancasila, sila ke-1 hingga ke-5. Pendidikan pada periode ini disesuaikan dengan Keputusan MPRS tahun 1966 dan 1973 yang menyebutkan bahwa pendidikan harus bertujuan untuk:

“pembentukan manusia pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-undang Dasar 1945” (TAP MPRS Tahun 1966 No.XXVII).

“membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila dan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokratis dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam UUD 1945” (TAP No. IV/MPR/1973; GBHN).

Dari tujuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan masa Orde Soeharto sengaja untuk diseragamkan, khususnya penyeragaman ideologi, yaitu Pancasila. Soeharto juga menanamkan ideologi militeristik dalam pendidikan umum karena ia merupakan anggota militer (Angkatan Darat). Melihat tujuan di atas menandakan bahwa produk pendidikan (lulusan) nantinya diarahkan untuk menjadi pekerja mengingat industrialisasi dan investasi yang cukup masif pada masa Soeharto. Pemerintah menjadikan murid hanya sebagai subjek dengan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan cara hafalan. Pendidikan dalam hal ini menjadi seperti dipaksakan agar seragam di seluruh Indonesia.

Pasca pemerintahan Soeharto sistem pendidikan di Indonesia semakin mengarah pada kebebasan. Mulai banyak institusi yang muncul, mulai dari institusi dasar hingga perguruan tinggi. Para murid di sekolah-sekolah diajarkan mata pelajaran yang berorientasi pada kemajuan global, seperti adanya pelajaran bahasa Inggris, Jepang, Perancis,

Mandarin, mata pelajaran yang berbasis teknologi dan lain sebagainya. Pemerintah memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, bahkan akhir-akhir ini kebijakan tersebut sudah bergeser ke Wajib Belajar 12 Tahun.

Secara umum kebijakan tersebut cukup membantu masyarakat, khususnya yang berada dalam garis ekonomi miskin. Melalui kebijakan tersebut anak-anak Indonesia dapat bersekolah tanpa mengeluarkan. Luaran dari pendidikan ini pun semakin disesuaikan dengan kualifikasi pekerjaan yang ada saat ini, mengingat pesatnya pertumbuhan industri dan kegiatan ekonomi bisnis di Indonesia. Misal, di pabrik-pabrik skala sedang untuk tenaga produksi biasanya diperlukan lulusan SMA/SMK. Sementara di perkantoran lebih diprioritaskan untuk lulusan perguruan tinggi. Sekarang pertanyaannya, apakah ini tujuan dari pendidikan yang sebenarnya, untuk bekerja di sektor industri dan sektor administrasi? Jika masih demikian, apa bedanya dengan pendidikan masa sebelumnya?

Saat ini, pendidikan nasional mengalami proses pemerataan. Melalui Kartu Indonesia Pintar yang digagas oleh pemerintah, maka anak-anak di seluruh Indonesia, khususnya anak yatim piatu dapat mengenyam Pendidikan secara gratis. Presiden Jokowi juga menegaskan jika pendidikan di Indonesia saat ini harus difokuskan pada 3 hal, yaitu pendidikan kejuruan, pendidikan vokasi, dan pelatihan vokasi (tempo.co, 4 Januari 2017). Pemerintah ingin mencetak tenaga profesional yang siap kerja dan bersaing di kancah internasional. Hal itu menyesuaikan program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang disepakati oleh negara-negara di Asia Tenggara. MEA memungkinkan adanya transfer pekerja lintas negara di Asia Tenggara.

Selain itu, hampir sama dengan periode sebelumnya, pendidikan di Indonesia harus menanamkan nilai-nilai Pancasila didalamnya. Hal itu dilakukan untuk menghadapi tatanan dunia yang semakin berubah. Dengan nilai-nilai Pancasila, maka generasi muda dapat menangkal radikalisme, ekstrimisme, dan rasisme. Selain itu, Pancasila dapat digunakan untuk pembangunan budaya, pembangunan karakter dan mental bangsa (tempo.co, 4 Januari 2017).

SIMPULAN

Motif pendidikan di Nusantara sejak masa prasejarah hingga saat ini telah mengalami dinamika yang cukup rumit. Pada masa prasejarah pendidikan ditujukan untuk hal-hal yang praktis agar bisa bertahan hidup (seperti berburu, meramu dan bercocok

tanam). Pada periode klasik pendidikan lebih ditekankan pada penyebaran agama-agama (Hindu-Buddha dan Islam). Periode kolonial pendidikan diarahkan untuk membentuk pegawai-pegawai pemerintah dengan gaji yang murah dan agar bisa mengawasi gerak masyarakat jika sewaktu-waktu memunculkan resistensi. Selanjutnya, pendidikan nasional juga mengalami proses panjang, karena sistem pendidikan selalu berubah setiap pergantian kekuasaan. Motif pendidikan pun disesuaikan dengan program kerja penguasa yang tidak terlepas dari pengaruh ideologi dan ekonomi. Jika dilihat prosesnya dari waktu ke waktu, motif pendidikan dari masa prasejarah hingga klasik memang mengalami perbedaan, dari pendidikan praktis ke pendidikan keagamaan. Namun, sejak periode kolonial hingga saat ini motif pendidikan di nusantara mengalami kontinuitas, yaitu ekonomi. Hal itu dapat dilihat dari luarannya yang memang sama-sama difokuskan untuk menjadi seorang pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewey, J. 1915. *Democracy and Education: an Introduction to the Philosophy of Education*. Delhi: Aakar Books.
- Djumhur, I & Danasuparta. 1959. *Sejarah Pendidikan di Indonesia*. Bandung: C.V. Ilmu.
- Feith, H. 1995. *Soekarno-Militer dan Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Leirissa, R.Z. 1985. *Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Manguin, Pierre-Yves. "Palembang And Sriwijaya: An Early Malay Harbour-City Rediscovered", dalam *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, Vol. 66, No. 1 (264) (1993).
- Moehadi (eds.). 1997. *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Tengah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI).
- Muljana, S. 2006. *Sriwijaya*. Yogyakarta: LKIS.
- Nursalim, M. 2006. *Prof. Dr. dr. Moh. Saleh Mangundiningrat (Potret Cendekiawan Jawa)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Redaksi. "Ini Program Pemerataan di Bidang Pendidikan Tahun 2017", dalam *Tempo.co*, Kamis, 4 Januari 2017. Diakses pada 25 Januari 2018 pukul 11.00 WIB.
- Santiko, H. "Kehidupan Beragama Golongan Rsi di Jawa", dalam *Edi Sedyawati (eds.). Monumen: Karya Persembahan Untuk Prof.Dr.R.Soekmono*. Depok: Fakultas

- Sastra Universitas Indonesia, 1990. Lembaran Sastra Seri Penerbitan Ilmiah No.11 Edisi Khusus hlm. 156-171.
- Sjamsuddin, H (eds.). 1993. Sejarah Pendidikan Zaman Kemerdekaan 1945-1966. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soejono, R.P. (ed.). 1977. Sejarah Nasional Indonesia I, Jaman Prasejarah di Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- TAP MPRS Tahun 1966 No.XXVII.
- TAP No. IV/MPR/1973 (GBHN).
- Undang-Undang Pokok Pendidikan Tahun 1950.
- Vlekke, Bernard H.M. 2008. Nusantara: Sejarah Indonesia. Jakarta: KPG.